



## Literasi sejarah pengelolaan hutan di Indonesia sebagai sumber pembelajaran kurikulum merdeka (studi di hutan pinus nongko ijo kare madiun Jawa Timur)

**Sastiya Devy Nur Pratiwi** ✉, Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Madiun

**Muhammad Hanif**, Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Madiun

**Novi Triana Habsari**, Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Madiun

✉ [sastiyadevy@gmail.com](mailto:sastiyadevy@gmail.com)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia khususnya hutan pinus Nongko Ijo yang berada di Kare Kabupaten Madiun dan potensinya sebagai sumber pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Penelitian dilakukan di kawasan hutan Kare yang terdapat beragam pohon Nongko Ijo. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data melalui triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan kecenderungan masyarakat berperan penting seperti dalam perkembangan dan pelestarian hutan pinus Nongko Ijo; 2) Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya hutan pinus Nongko Ijo potensial sebagai sumber pembelajaran terkait dengan nilai-nilai sejarah, sehingga dapat menunjukkan relevansinya dengan perubahan-perubahan dalam proses kemajuan dan perkembangan literasi berdasarkan pembelajaran Kurikulum Merdeka.

---

**Kata kunci:** Literasi Sejarah, Pengelolaan Hutan, Sumber Pembelajaran, Kurikulum Merdeka

---



## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah. Melimpahnya kekayaan alam Indonesia mencakup wilayah laut dan darat. Kekayaan alam laut dapat dilihat dari sisi luasnya perairan Indonesia, sedangkan daratan berupa melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang salah satunya bersumber dari hutan. Hutan Indonesia tersebar merata di beberapa wilayah pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali – Nusa Tenggara. Pasal 1 ayat 2 dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang mendominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan di Pulau Jawa mempunyai peran sebagai penyangga ekosistem Pulau Jawa, di sisi lain hutan di pulau itu juga mengalami tekanan yang luar biasa dari masyarakat akibat perkembangan penduduk, sehingga hutan di Pulau Jawa juga dituntut untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Di sisi lain hutan di Pulau Jawa juga harus berfungsi ekologis (Ekawati, S., Budiningsih, K., Sylviani, S. E., & Hakim, 2015)

Pengelolaan dapat diartikan melakukan sesuatu yang lebih tepat sesuai kebutuhan agar lebih bermanfaat pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Sholikah, M., & Oktarina, 2019)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021, meluncurkan Kurikulum Prototipe yang direncanakan sebagai pengganti Kurikulum 2013. Kurikulum Sekolah Penggerak resmi berubah nama menjadi Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjelaskan bahwa pemerintah merilis program Merdeka Belajar bernama Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar yang sebelumnya telah diuji pada 2.500 Sekolah Penggerak (Ridwansah, 2022). Kurikulum merdeka diterapkan menjadi upaya pengendalian krisis pembelajaran (loss learning). Kurikulum Merdeka berisi pembelajaran intrakurikuler yang beraneka ragam dan memiliki konten inti yang lebih optimal. Hal demikian supaya peserta didik mempunyai waktu cukup untuk memperdalam konsep dan memperluas kompetensi.

Kabupaten Madiun memiliki 15 kecamatan yang salah satunya Kecamatan Kare. Kecamatan Kare memiliki luas 35,93 Km<sup>2</sup> dan ketinggian 57 Meter diatas permukaan laut dan itu menjadikan wilayah Kare sebagai daerah tertinggi di Kabupaten Madiun. Suhu dan cuaca yang mendukung pada wilayah Kecamatan Kare sehingga banyak tumbuhan bisa hidup asri dan berkembang dengan baik. Wilayah Kare memiliki luas Hutan 3.059,00 Ha dari total 12.214,00 Ha luas hutan Kabupaten Madiun (Hartono, 2022). Luasnya wilayah hutan menjadikan Kare sebagai salah satu sasaran destinasi kunjungan masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Madiun. Salah satu icon terkenal yang sering dikunjungi yakni Hutan Pinus Nongko Ijo. Dikatakan dalam kurun waktu tertentu, wisatawan Hutan Pinus Nongko Ijo bisa mencapai 200 bahkan ribuan pengunjung (Agus, 2022). Diperlukan penelitian untuk mengetahui keterkaitan sejarah pengelolaan hutan pinus Nongko Ijo sebagai sumber pembelajaran Kurikulum Merdeka.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian melibatkan peneliti di dalam peristiwa atau situasi yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, diperlukan kedalaman analisis oleh peneliti ketika sedang melakukan riset dalam menemukan hasil penelitian dengan memperoleh data utama melalui wawancara dan juga observasi. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif yang digunakan yaitu studi kasus. Pemilihan studi kasus didasarkan pada hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa literasi sejarah pengelolaan hutan di Indonesia sebagai sumber pembelajaran kurikulum merdeka memiliki manfaat yang sangat kompeten pada Kurikulum Merdeka Belajar.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data wawancara dengan informan yang bertemu secara langsung dengan pihak pengelola hutan pinus Nongko Ijo dan ketua POKDARWIS wilayah Kare. Sumber sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku-buku, serta dokumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak pengelola hutan pinus Nongko Ijo dan ketua POKDARWIS wilayah Kare dengan alat perekam suara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan melakukan tatap muka dengan informan atau individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tema yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan pengelola hutan pinus, ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS), dan ahli kehutanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Pengambilan sampel informan dilakukan dengan pertimbangan tertentu misalnya informan yang berkompeten dan dianggap paling tahu sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, artinya peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain, membandingkan sumber hasil wawancara dengan dokumen atau buku yang sudah ada. Teknik triangulasi ini untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Cara penggunaannya yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dicek dengan wawancara.

## HASIL PENELITIAN

### **Sejarah Pengelolaan Hutan Pinus Nongko Ijo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

Data Literasi sejarah pengelolaan hutan di Indonesia sebagai sumber pembelajaran kurikulum merdeka (studi di hutan pinus Nongko Ijo Kare Madiun Jawa Timur) diperoleh dari wawancara mendalam dengan Kepala pengelola hutan pinus Nongko Ijo dan observasi lapangan pada lokasi hutan pinus Nongko Ijo Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Kawasan hutan pinus Nongko Ijo merupakan kawasan yang berada di lereng gunung Wilis kecamatan Kare. Narasumber dengan nama Yudha Wibowo selaku kepala pengelola hutan pinus Nongko Ijo. Nongko Ijo sendiri memiliki arti buah nangka yang berwarna hijau. Nama “Nongko Ijo” sering disalah artikan oleh masyarakat luas, Nongko Ijo bukan berasal dari kawasan yang penuh dengan pohon nangka. Akan tetapi nama tersebut diambil dari sebuah dusun terdekat yang memiliki nama Nongko Ijo. Hal inipun dibenarkan pula oleh ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS) wilayah Kare yang bernama Bapak Andik (46) menyatakan hal yang serupa. Dan disisi lain pengenalan nama Nongko Ijo karena sebuah ketidak sengajaaan yang menjadi keberuntungan bagi pengelola. Dimana adanya surat kabar pertama yang mencangkup berita tentang kawasan wisata baru bernama Hutan Pinus Nongko Ijo karena belum memiliki nama secara sah dan akhirnya karena sudah terpublisnya berita dengan nama Hutan Pinus Nongko Ijo pun di anggap berkah karena unik dan mudah diingat oleh masyarakat baik lokal maupun luar kawasan Madiun sehingga nama tersebut dipakai hingga saat ini.

Pada awalnya kawasan ini merupakan kawasan biasa, kawasan hutan pinus yang sama seperti pada umumnya. Kawasan ini milik perhutani berlokasi di bawah kaki gunung Wilis sehingga memiliki udara dan suasananya yang amat nyaman. Pohon-pohon pinus yang tinggi dan rindang itu telah ditanam di sana semenjak tahun 1981. Sehingga saat ini sudah menjulang tinggi rindang. Hingga dimulai dari ide cemerlang para pemuda di lingkungan sekitar yang

bekerjasama dengan pengelola hutan mengubah kawasan ini menjadi destinasi wisata populer dan menjadi penunjang UMKM masyarakat sekitar.

Kawasan Hutan pinus ini terletak di Hutan Lindung di petak 28 RPH (Resort Pengelolaan Hutan). Berdiri di dalam lingkup perlindungan perhutani KPH Lawu sejak bulan juni 2016. Namun pengelola secara utuh dipegang langsung oleh para pemuda di sekitar kawasan Hutan pinus nongko ijo yang membentuk kelompok dan disahkan oleh kelompok sadar wisata kawaasan Kare. Pada tahun 2023 ini masa kepengurusan pengelola sudah menduduki pergantian ke tiga.

Dalam masa operasional selamakurang lebih tujuh tahun dapat dikatakan segi perkembangan yang terjadi pada kawasan ini sangat lambat. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal. faktor internalnya sendiri disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli pengelola kawasan wisata pada masa periode awal. Sehingga menyebabkan kurang terstrukturnya manajemen pengelolahan dan pengembangan jaringan relasi baik offline maupun online melalui media sosial. Hal ini menyebabkan masih kurang tereksposnya kawasan wisata hutan pinus nongko ijo. Dan faktor eksternalnya adalah hantaman pandemi pada masa kejayaan Hutan pinus nongko ijo yang pada akhirnya menyebabkan kawasan wisata ini ditutup selama kurun waktu 2 tahun. Sampai pada akhirnya dibuka kembali pada tahun 2022 namun harus memulai kembali dari awal.

Saat ini kawasan hutan pinus nongko ijo sudah mengalami perkembangan. Fasilitas yang ada di kawasan hutan pinus nongko ijo juga sudah memadai. Dari hasil obsevasi waktu lalu terlihat rampungnya pembangunan mushola dan toilet umum. Selain itu kawasan hutan pinus nongko ijo ini juga menyediakan banyak sport foto dan tempat bermain anak. Fasilitas penunjang lainnya yakni lahan perkemahan yang luas, lahan parkir memadai, dan warung makanan yang amat banyak dengan kuliner yang cukup menarik. Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan kecenderungan masyarakat berperan penting seperti dalam perkembangan dan pelestarian hutan pinus Nongko Ijo.

### **Potensi Sejarah Pengelolaan Hutan Pinus Nongko Ijo Sebagai Sumber literasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka**

Data Literasi sejarah pengelolaan hutan di indonesia sebagai sumber pembelajaran kurikulum merdeka (studi di hutan pinus nongko ijo kare madiun jawa timur) diperoleh dari wawancara mendalam dengan Kepala pengelolah hutan pinus nongko ijo dan observasi lapangan pada lokasi hutan pinus nongko Ijo Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Dalam kurikulum merdeka Kd 3.5 modul sejarah Indonesia kelas XI bab Tanam Paksa merupakan relevansi potensi penelitian Sejarah Pengelolaan Hutan Pinus Nongko Ijo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dapat dijadikan sumber pembelajaran khususnya pada kurikulum merdeka. Adapun beberapa potensi hutan pinus nongko ijo di antara lainnya adalah : 1) sebagai tempat wisata, 2) pemberian ilmu pembelajaran berharag, 3) meningkatkan kecintaan pada alam, 4) dan sebagai tempat menenangkan diri.

Kawasan hutan pinus nongko merupakan kawasan yang dikunjungi oleh semua kalangan masyarakat. Baik dari tingkatan umur balita hingga lansia. Kawasan hutan pinus nongko ijo sendiri saat ini juga sering dijadikan pilihan lokasi kegiatan sekolah baik TK, SD, SMP, SMA hingga tingkat Universitas. Sama seperti karakteristik kurikulum merdeka yang dimana mengunggulkan pengembangan soft skills dan karakter, fokus pada materi esensial, memiliki gaya pembelajaran yang fleksibel, dan Proyek penguatan profit pelajar pancasila.

Dengan adanya kawasan yang memadai secara fasilitas sarana dan prasarana apalagi di tambah pula dengan suasana yang sejuk dan rindang membuat daya ketenangan dalam menangkap interaktif sosial lebih mudah. Sehingga perkembangan anak dalam menyerap materi dari lensa mata yang mereka tangkap lebih cekatan.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia

Pengelolaan menurut Siagian adalah ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan (Herman, 2015). Pengertian pengelolaan (manajemen) telah banyak diungkapkan oleh para ahli manajemen, meskipun dalam hal pengartiannya belum mempunyai kesamaan. Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu mengarahkan seseorang dalam mencapai suatu tujuan (Hasbiyallah dan Sujudi, 2019: 1). Menurut Arifin Abdul Rachman, pengelolaan didefinisikan sebagai kegiatan, proses kegiatan dengan berbagai urutan-urutan, dan lembaga/orang-orang yang melakukan proses kegiatan. Menurut Marry Parker Follet, pengelolaan adalah seni yang dalam menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain (Zahroh, 2015: 176-177).

Kegiatan pengelolaan terdapat 8 unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan, yaitu: Organisasi, Manajemen, Komunikasi, Informasi, Personalia, Pembekalan, Humas. Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal terhadap usaha kerja sama perusahaan (Dewi, 2011). Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut : 1) Menentukan strategi, 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawa, 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu, 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana, 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi, 6) Menentukan ukuran untuk menilai , 7) Mengadakan pertemuan, 8) dan pelaksanaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan menyatakan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Hutan atau rimba dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk membuka ladang maupun mengambil hasil hutan berupa kayu maupun non-kayu. Hutan sebagai tempat tinggal bagi spesies tumbuhan ataupun hewan, serta menyediakan lahan untuk pemukiman dan pertanian (Cahyanto, T., 2014).

Kawasan hutan diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP), meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK), meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Berdasarkan Pasal 2, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 33 pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Dalam pasal 6 menyatakan Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan:

- a. Rancangan Tata Hutan ; dan
- b. Jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada unit
- c. Pengelolaan Hutan.
- d. Sedangkan penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan: Pemanfaatan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; rehabilitasi dan reklamasi Hutan; dan pengelolaan perhutanan sosial.

Jenis-jenis hutan sendiri terdapat beberapa macam. Dimana pengelompokannya sudah disusun dengan berdasarkan pada aspek pengelompokan ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam Identifikasi serta pengelolaan hutan itu sendiri. Secara umum, jenis-jenis

hutan di Indonesia di bagi ke dalam enam kelompok besar. Dimana dari keenam kelompok itu, pada nantinya masih di bagi kedalam beberapa sub jenis. Secara umum, hutan di kelompokan menjadi enam bagian. Keenam bagian tersebut adalah : 1) Hutan yang dikelompokan berdasarkan iklim, 2) Hutan berdasarkan Variasi iklim, jenis tanah, dan bentang alam, 3) Hutan berdasarkan terbentuknya, 4) Jenis- jenis hutan berdasar status, 5) Hutan berdasar jenis tanamannya, 6) Berdasarkan Fungsinya.

Keenam jenis hutan, masing- masing masih memiliki sub bagian sendiri. Hal ini karena pada masing- masing bagian, memiliki pengelompokan yang lebih spesifik lagi. Seperti pada hutan yang di kelompokan berdasarkan musimnya, di dalam kelompok tersebut masih terbagi menjadi dua yaitu Hutan Hujan Tropika dan Hutan Monsun (saputri, 2017).

Pengelolaan hutan di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak masa kerajaan terutama di Pulau Jawa. Pengelolaan yang dilakukan oleh kerajaan pada saat itu menunjukkan penguasaan hutan di Pulau Jawa dikuasai untuk kemewahan raja dan penghidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian pada masa kolonial atau pada masa penjajahan, pengelolaan dilakukan dengan membatasi akses masyarakat terhadap hutan dengan adanya kebijakan - kebijakan penguasa pada saat itu dan isu – isu mistis yang disebarkan kepada masyarakat. Pembatasan tersebut menyebabkan ketakutan masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak merasakan fungsi dari hutan itu sendiri (Budiono Dkk, 2018).

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah salah satu program strategi pembangunan kehutanan di Indonesia. Pelibatan, pemberian akses dan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan telah menjadi keniscayaan dan paradigma untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, sekaligus menyejahterakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Gerakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau kehutanan masyarakat yang saat ini lebih dikenal dengan perhutanan sosial lahir dari sebuah proses panjang dan tidak bisa lepas dari sejarah pengelolaan hutan di Indonesia.

Pemerintah pada masa itu membuka akses untuk masyarakat agar mampu memanfaatkan hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan melalui berbagai macam program perhutanan sosial. Perdebatan dalam proses pembuatan kebijakan kehutanan pasca reformasi sampai sekarang telah terjadi sebelum adanya pembentukan Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Perdebatan tersebut melibatkan berbagai macam kalangan terutama masyarakat dan Negara. Hal tersebut dikarenakan antar kedua belah pihak memiliki kepentingan dalam proses penguasaan hutan. Kontestasi tersebut pada prosesnya melibatkan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, praktisi hukum, kademisi, sosiolog, dan juga pengusaha dibidang kehutanan. Hasil dari kontestasi tersebut kemudian tetap melahirkan kebijakan yang ber-ideologi domainverklaring yang artinya tetap mempertahankan kontrol Negara atas hutan (Budiono Dkk, 2018).

Program PHBM digagas oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 melalui surat keputusan direksi Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan bersifat kolaboratif yaitu dilakukan dengan memaksimalkan peran dari kelompok masyarakat personil dari perhutani dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masyarakat yang tergabung kedalam PHBM pun memiliki akses atas hutan yaitu mendapatkan keuntungan dari program PHBM tersebut. Keuntungan yang diperoleh kemudian didapatkan dari hasil tanaman pertanian yang ditanam di sela – sela tanaman pokok kehutanan dan proses bagi hasil dari penebangan akhir. Masyarakat yang tergabung ke dalam PHBM juga memiliki kewajiban yaitu dengan menjaga dan merawat tanaman pokok yang di tanam oleh Perhutani (Winata & Yuliana, 2017).

Berdasarkan uraian terkait pengelolaan dan hutan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan merupakan gerakan pemberdayaan hutan secara fungsional untuk mencapai tujuan melalui kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan konservasi alam.

### **Sumber Pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum Merdeka**

Sumber belajar merupakan sesuatu yang dimanfaatkan pada kegiatan proses belajar mengajar oleh guru dan siswa untuk memudahkan mempelajari dan memahami materi pelajaran (Haryono, 2015:37). Sumber belajar difungsikan untuk memudahkan individu mencapai pemahaman dalam ranah ilmu pengetahuan. Selain itu juga untuk memperkaya suasana dalam kegiatan pembelajaran. Wina Sanjaya (2010:175) menyebutkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar disini meliputi, orang, alat dan bahan, aktivitas, dan lingkungan.(Sanjaya, 2010)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung ilmu pengetahuan bagi manusia yang berada di sekitarnya. Tujuan dari sumber belajar adalah agar siswa mampu menerima ilmu lebih mudah sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan siswa masing - masing. Fungsi sumber belajar yaitu sarana mengembangkan keterampilan dalam memperoleh pengetahuan baru, hubungan siswa dan lingkungan semakin erat, mengembangkan pengetahuan siswa dan pembelajaran lebih bermakna. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Trianto (2010:203) menyebutkan sumber belajar mencakup semua sumber yang digunakan siswa agar terjadi perilaku belajar. Peranan sumber belajar yaitu mentransmisi informasi kepada siswa tentang dunia disekitar mereka. Adanya sumber belajar membuat siswa aktif dalam belajar dan mengenal berbagai hal di sekitarnya. (Trianto, 2010). Menurut Haryono (2015:44) sumber belajar dibagi menjadi 2 yaitu: sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang dirancang sesuai materi untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah kepada siswa bahkan masyarakat, sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber belajar yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan sesuai dengan materi pembelajaran tanpa dirancang secara khusus. Majid (2012: 170- 172) membagi sumber belajar menjadi 6 (enam), yaitu:

- a. Lingkungan  
Lingkup lokasi sekitar siswa baik alam maupun non alam dapat menjadi sumber belajar bagi siswa. Siswa sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan belajarnya dengan sasaran lingkungan. Misalnya gunung, pantai, taman, perkebunan, hingga hutan.
- b. Benda  
Dalam sebuah pembelajaran benda dapat berfungsi sebagai media yang memberikan perkembangan dalam pemahaman siswa. Salah satu contoh umumnya adalah relief pada bangunan candi.
- c. Manusia  
Manusia mampu menjadi sumber belajar paling umum pada siswa, karena manusia merupakan makhluk sosial. Contoh sumber belajar pada manusia paling umum adalah guru, pegawai, petani,dll.
- d. Buku  
Sumber belajar yang bentuk cetakan berisikan materi ilmu pengetahuan. Buku dapat dipelajari secara manual oleh siswa.
- e. Peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi  
Banyak peristiwa yang terjadi disekitar siswa yang dapat dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran, misalnya peristiwa bencana alam, peristiwa tindakan kejahatan dan sebagainya.(Abdul, 2012).

Jenis-jenis sumber belajar sejarah menurut Abd. Rahmad Hamid (2014 60-76) adalah sebagai berikut: peta dan atlas, Kamus sejarah, ensiklopedia, surat kabar, arsip, karya historiografi, Film Dokumenter dan Diorama Sejarah (Wahid, 2014).

Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal, untuk mencapai hasil belajar yang optimal dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa (Sanjaya, 2010). Di dalam pengantar buku kajian kurikulum merdeka dijelaskan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya

Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi, dan menjadi semakin parah karena pandemi.

Keputusan Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Sejarah pada Tingkat Sekolah Menengah, dalam narasinya dijelaskan bahwa proses pembelajaran sejarah untuk melahirkan pemahaman dan kesadaran sejarah mengenai peristiwa yang terjadi di Indonesia mulai dari masa asal usul nenek moyang hingga masa-masa Reformasi adalah sebuah perjalanan panjang melintasi ruang dan waktu, dimana banyak terkandung pelajaran di dalamnya. Kemudian Lingkup Strandar Kecakapan dalam mata pelajaran Sejarah, meliputi: a. Keterampilan Konsep Sejarah (*Historical Conceptual Skills*) b. Keterampilan Berpikir Sejarah (*Historical Thinking Skills*) c. Kesadaran Sejarah (*Historical Consciousness*) d. Penelitian Sejarah (*Historical Research*) e. Keterampilan Praktis Sejarah (*Historical Practice Skills*).

Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Tim, 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala pengelola hutan pinus nongko ijo, diperoleh data secara umum dari pengelolaan hutan pinus Nongko Ijo dan pengunjung yang hadir. Data lain diperoleh terkait kejelasan sistem pengelolaan hutan pinus nongko ijo dan keterlibatan dengan pengunjung. Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya hutan pinus Nongko Ijo potensial sebagai sumber pembelajaran terkait dengan nilai-nilai sejarah, sehingga dapat menunjukkan relevansinya dengan perubahan-perubahan dalam proses kemajuan dan perkembangan literasi berdasarkan pembelajaran Kurikulum Merdeka.

## SIMPULAN

Kurikulum Merdeka Belajar memberi kebebasan bagi guru dan siswa mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang sudah ada pada dirinya dalam pelatihan, nilai lebih ditempatkan pada aspek pengetahuan. Kurikulum merdeka belajar merupakan salah satu strategi dalam mengembangkan pendidikan karakter. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat mengimplementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia lebih kuat terhadap kehidupan sehari-hari dan terhadap lingkungan untuk mencapai pendidikan yang ideal dan layak.

Adanya Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan zaman. Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya membuat siswa cerdas, namun juga ditandai dengan nilai Pancasila yang disebut sebagai bentuk profil penguatan Pelajar Pancasila. Profil penguatan Pelajar Pancasila mewujudkan peserta didik Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan kompetensi global dan bertindak sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

Literasi sejarah pengelolaan hutan pinus Nongko Ijo yang dapat menjadi tempat berhaga untuk belajar yang relevan dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan kecenderungan masyarakat berperan penting seperti dalam perkembangan dan pelestarian hutan pinus Nongko Ijo. Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya hutan pinus Nongko Ijo potensial sebagai sumber pembelajaran terkait dengan nilai-nilai sejarah, sehingga dapat menunjukkan relevansinya dengan perubahan-perubahan dalam proses kemajuan dan perkembangan literasi berdasarkan pembelajaran Kurikulum Merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2012). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Rosda Karya.
- Cahyanto, T., D. C. dan T. S. (2014). Analisis Vegetasi Pohon Hutan Alam Gunung Manglayang Kabupaten Bandung. *Jurnal Istak*, 2(8), 145–161.
- Ekawati, S., Budiningsih, K., Sylviani, S. E., & Hakim, I. (2015). Kajian tinjauan kritis pengelolaan hutan di Pulau Jawa. *Policy Brief*, 9(1).  
<http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/PB.2015.1.pdf>.

- Herman, K. (2015). Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, V(2), 183.
- Sanjaya, W. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sholikhah, M., & Oktarina, N. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan Untuk Menunjang Akuntabilitas Sekolah. *Publika : JIAP*, 7(3), 1178–1192.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/eeaj.v7i3.28348> .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabetha.
- Tim, K. (2015). *Paradigma Capaian Pembelajaran*.
- Trianto. (2010). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, A. R. (2014). *Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.